



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/278 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/203/2025  
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jumlah usulan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/203/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/203/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Seluruh Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Seluruh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Bagian di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/278/2025  
TANGGAL 21 Juli 2025.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
1.	DISPORAPAR	Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda;	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023
2.	DISDIKBUD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;</li><li>2. Peningkatan Edukasi Karakter dan Agama (PEKA);</li><li>3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong;</li></ol>	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3.	DISKOPUKMPERINDAG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (GERBANG BAROKAH) di Kabupaten Tabalong;</li><li>2. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</li></ol>	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4.	BKPSDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;</li> <li>2. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>3. Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;</li> <li>4. Aparatur Sipil Negara Berprestasi;</li> <li>5. Penyelenggaraan Penerapan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5.	INSPEKTORAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Percepatan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li> <li>3. Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;</li> <li>4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		5. Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah;	
6.	BAPENDA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Sewa Reklame;</li><li>2. Sistem Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah;</li><li>3. Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintahan untuk Mencapai Program Prioritas Nasional;</li></ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	DPMD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;</li><li>2. Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026;</li><li>3. Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;</li><li>4. Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada</li></ol>	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<p>Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;</p> <p>5. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;</p> <p>6. Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2025;</p> <p>7. Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2026;</p> <p>8. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa;</p> <p>9. Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>10. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pihak Lainnya;</p> <p>11. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;</p> <p>12. Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Desa;</p> <p>13. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binjai Dengan Desa Uwie Kecamatan Muara Uya, Desa Bilas, Desa Kaong Kecamatan Upau, Desa Kembang Kuning</p>	

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		Kecamatan Haruai, Desa Kambitin Raya dan Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;	
8.	DPUPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kelua;</li> <li>2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tanta;</li> <li>3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Muara Uya;</li> <li>4. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Jaro;</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Wilayah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023-2043
9.	BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;</li> <li>2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> </ol>	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10.	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;</li> <li>2. Penetapan Standar Pelayanan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>3. Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong;</li> </ol>	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
11.	RSUD H. Badaruddin Kasim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong;</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) Rumah Sakit Daerah Umum H. Badaruddin Kasim;</li> <li>3. Penetapan Penerima dan Besaran Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;</li> <li>4. Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Dari Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;</li> </ol>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah</p>
12.	DKPPTPH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;</li> <li>2. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Teduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;</li> <li>3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pangan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
13.	SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li> <li>2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li> <li>3. Peta Proses Bisnis Daerah Kabupaten Tabalong;</li> </ol>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p>

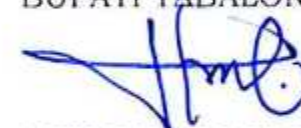
No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;</li><li>5. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong;</li><li>6. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;</li><li>7. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li><li>8. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li><li>9. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah;</li><li>10. Pelayanan Air Minum PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda);</li><li>11. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pugaan Kecamatan Pugaan dan Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;</li></ol>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
14.	DISNAKER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;</li> <li>3. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>
15.	SEKRETARIAT DPRD	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat zDaerah
16.	DINKES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Biaya Bagi Pendamping Pasien untuk Masyarakat Kabupaten Tabalong;</li> <li>2. Petunjuk Teknis Pelayanan <i>Home Care</i> Pada Masyarakat Khusus Lansia dan Disabilitas di Kabupeten Tabalong;</li> <li>3. Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>4. Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>5. Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</p>

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="817 280 1736 394">6. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li><li data-bbox="817 427 1736 654">7. Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li data-bbox="817 686 1736 800">8. Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Pihak Lain;</li><li data-bbox="817 833 1736 946">9. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li data-bbox="817 979 1736 1092">10. Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li data-bbox="817 1125 1736 1239">11. Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tabalong;</li></ol>	

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		12. Struktur Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tabalong; 13. Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong;	
17.	DISKOMINFO	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI